

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pengendalian Internal adalah suatu cara untuk memberi arahan melakukan pengawasan dan mengukur sumber daya pada suatu organisasi.<sup>1</sup> Pengendalian Internal memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan serta melindungi sumber daya organisasi, baik yang berwujud ataupun tidak. Pencapaian baik atau tidaknya kinerja suatu organisasi didasarkan pada standar-standar tertentu, dapat pula pada profitabilitas yang diperoleh oleh organisasi tersebut. Hasil perhitungan rasio profitabilitas dapat menggambarkan ukuran efektivitas manajemen secara keseluruhan, berkaitan dengan kemampuannya mendapatkan laba, baik dalam hubungannya dengan aset, investasi, maupun penjualan.<sup>2</sup>

Pengendalian Internal terbagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>3</sup>

1. Pengendalian Akuntansi termasuk dalam sistem pengendalian internal yang dialaminya meliputi beberapa struktur organisasi, semua prosedur dan catatan yang berkaitan dengan pengamanan kekayaan serta dipercayai catatan keuangannya.
2. Pengendalian Administratif berupa rencana organisasi termasuk segala prosedur dan catata-catatan yang mempengaruhi pengamabilan keputusan yang mengarah pada orientasi manajemen atas transaksi

---

<sup>1</sup>Prastowo.,& Julianty R,*Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: AMP YPKN, 2005) hlm.47

<sup>2</sup>Prastowo., *Laporan Keuangan*, hlm., 49

<sup>3</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum* (Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan, 2003), hlm.2-3

Pengendalian internal perlu diterapkan oleh setiap lembaga keuangan dan perusahaan, baik itu dikelola oleh Negara maupun Swasta oleh setiap lembaga dan perusahaan, baik itu lembaga pemerintahan maupun swasta termasuk didalamnya lembaga keuangan konvensional dan syariah. Karena lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan maupun non finansial aset atau aset riil berlandaskan konsep syariah.<sup>4</sup>

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadist.<sup>5</sup> Saat ini lembaga keuangan syariah mempunyai peranan cukup strategis dalam menyasrakan, mengembangkan perekonomian dan membantu pembangunan nasional khususnya dalam beberapa infrastruktur yang penggunaannya mampu mengimplementasikan nilai-nilai Syariah.

Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan didirikannya BPRS yakni sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi.

---

<sup>4</sup>Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan Dan Lembaga Nirlaba Sejenis* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007), hlm.193

<sup>5</sup> Mahayu Okta Irlanda, "Analisis Penerapan PSAK No. 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Bangun Drajat Warga Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta." *Jurnal Profita Edisi 3*, (2017), hlm.2. ISSN 2345-2335

<sup>6</sup>Kautzar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), hlm.

3. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup memadai.

Kegiatan usaha BPRS secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasar pada pasal 2 dan pasal 3 PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, serta SEBI No.10/14/DPbS Jakarta, 17 maret 2009 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.<sup>7</sup>

BPRS menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah. Tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia terbilang cukup tinggi, karena telah melampaui batas maksimum 5%, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2019 *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS sebesar 9,02%.<sup>8</sup> Tingginya NPF pada BPRS ini harus segera ditangani agar tidak membawa dampak buruk yang merugikan.

Bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 58.

<sup>8</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah*”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/lap32/g2/> pada tanggal 14 Mei 2019 Pukul 15.48.

bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah.<sup>9</sup>

Produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi yaitu produk pembiayaan. Produk pembiayaan menghadapi risiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta dikelola secara tepat.<sup>10</sup> BPRS Bhakti Sumekar telah mampu meraih kinerja positif di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan terjadi pada tahun 2017. Bulan Desember 2017 total Aset BPRS Bhakti Sumekar mencatatkan kenaikan 24,30 persen menjadi sebesar Rp 765,67 miliar. Pertumbuhan aset ditopang oleh peningkatan dana pihak ketiga dan pembiayaan sebesar 32,12% dan 26,46% masing-masing menjadi Rp. 441,57 miliar dan Rp. 542,31 miliar pada akhir tahun 2017. Rasio keuangan lainnya, seperti rasio pembiayaan bermasalah (NPF) terjaga dilevel 2,38% dan pada juni 2019 NPFnya berada dilevel 3,89%, *return on assets* (ROA) dilevel 2,14% dan *return on equity* (ROE) dilevel 11,50%. Rasio kecukupan modal (CAR) ada dilevel 39,99% ditopang modal inti yang bertambah menjadi Rp 130,03 miliar.<sup>11</sup>

Risiko pembiayaan merupakan risiko terbesar yang dihadapi oleh perbankan dibandingkan dengan risiko-risiko lain, sehingga bank perlu menerapkan kebijakan yang tepat dalam hal mengelola pembiayaan untuk meminimalkan risiko, menghindari kerugian yang mungkin terjadi dan selanjutnya meningkatkan

---

<sup>9</sup> Mares Suci Ana Popita, "Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 2(4), (2013), hlm.405. ISSN 2301-10

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Portal Madura, "BPRS Bhakti Sumekar Raih 3 Penghargaan", diakses dari <https://portalmadura.com/bprs/3/r21/>, pada tanggal 15 Oktober 2019 Pukul 13.21.

keuntungan bagi bank.<sup>12</sup> Bagi pihak lembaga keuangan, penilaian kinerja suatu organisasi dianggap sangat penting, karena menggambarkan kondisi sebenarnya pengelolaan organisasi tersebut secara keseluruhan. Keputusan pemberian pembiayaan dilakukan sebuah lembaga seperti perbankan akan menanggung risiko (*future risk*), yaitu dalam debitur tersebut tidak mampu untuk melunasi kewajiban angsuran pembiayaan hingga lunas.<sup>13</sup>

Pembiayaan macet pada bank biasanya disebabkan oleh:

1. Unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya pada pihak bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri macet.
2. unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terjadi musibah misalnya banjir atau kebakaran.
3. kelalaian karyawan bagian pembiayaan, pihak analisis kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan terhadap rasio-rasio yang ada. Pembiayaan macet juga dapat diakibatkan adanya kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Kholis, "Analisis Pengendalian *Intern* Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep" (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm.6.

<sup>13</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.159.

<sup>14</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm.120.

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan rasio keuangan BPRS Bhakti Sumekar 2016-2018**

Keterangan	2016	2017	2018
NPF (Non Performing Financing) Gross	2,09%	2,39%	3,09%
CAR (Capital Adequacy Ratio)	40,64%	38,33%	34,37%
ROA (Return Of Asset)	03,15%	2,14%	1,65%
ROE (Return Of Earning)	15,17%	11,50%	10,38%
FDR (Financing Deposit Ratio)	71,35%	73,67%	73,07%
BOPO (Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi)	77,06%	67,67%	74,66%

Sumber: [www.bhaktisumekar.co.id](http://www.bhaktisumekar.co.id), data diolah.

Dari tabel diatas BPRS Bhakti Sumekar mengalami penurunan kinerja yang terbukti dengan naiknya NPF dari dilevel 2,09% 2016 menjadi 3,09% pada juni 2018, bahkan sampai pertengahan juni 2019 terus meningkat dilevel 3,89%, ini terjadi setiap tahunnya secara berturut-turut selama tiga tahun dari 2016 sampai pertengahan 2019, jika dijabarkan pada tahun 2016 NFP BPRS Bhakti sumekar ada di level 2.09%, 2017 dilevel 2,39% dan pada tahun 2018 meningkat lebih signifikan dari pada tahun sebelumnya yaitu di level 3,09%.

Kinerja suatu bank dapat dinilai baik dan efektif apabila mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik disetiap periodenya atau mampu mengalami peningkatan secara rata-rata dari total aspek penilaian kinerja suatu bank, termasuk rasio risiko pembiayaannya, Per Desember 2018 NPF BPRS Bhakti Sumekar memang masih berada dibawah batas maksimum yaitu 5% yaitu 3,09% sedangkan total pembiayaan pada tahun tersebut adalah Rp. 633.479.000.000, jika dikalikan dengan NPF per Desember 2018 maka jumlah pembiayaan bermasalah

sebesar Rp. 19.547.501.100, merupakan angka yang cukup tinggi jika dibiarkan terus meningkat setiap tahunnya.<sup>15</sup>

Laporan keuangan BPRS Sumekar dari 2016-2018 NPF BPRS Bhakti Sumekar terus mengalami peningkatan dalam rasio risiko pembiayaan atau NPF, semakin besar rasio NPF maka semakin besar pula pembiayaan yang bermasalah, hal ini pula menunjukkan adanya kinerja dari pengendalian internal yang kurang efektif, karena tidak mampu mencegah atau mempertahankan rasio NPF agar tidak meningkat dari periode selanjutnya minimal mampu mempertahankan, namun yang terjadi rasio NPF BPRS Sumekar terus mengalami peningkatan, apabila hal ini terus berkelanjutan tanpa adanya identifikasi dan pencegahan masalah, rasio NPF BPRS Bhakti Sumekar pada tahun 2023 diprediksi akan melebihi batas maksimum 5% jika dilihat dari rata-rata peningkatan setiap tahunnya dari 2016-2018.

Pengendalian Internal pada BPRS Bhakti Sumekar bisa dikatakan terjadi masalah sehingga perlu dilakukan pengukuran efektivitas guna mengetahui sejauh mana perusahaan berkembang dan mendapatkan Informasi tentang segala target yang dicitakan, Pengukuran ini juga dapat membantu dalam bahan Evaluasi suatu perusahaan. Pengendalian internal yang baik dalam penyaluran pembiayaan sangat diperlukan, karena permasalahan yang dihadapi bank dan lembaga keuangan lainnya tidak hanya disebabkan kelalaian, dapat juga disebabkan karena

---

<sup>15</sup> Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar 2018, diakses dari [www.bprs.go.id](http://www.bprs.go.id) pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 08.21 WIB

kecurangan-kecurangan pihak bank itu sendiri. Pengendalian internal yang baik mampu menciptakan pelaporan keuangan yang baik pula.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian berjudul **“Efektivitas Manajemen Pengendalian Internal Pada Lembaga Keuangan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian bagaimana Efektivitas Manajemen Pengendalian Internal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan harapan dari apa yang telah tertera dalam fokus penelitian sehingga dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pengendalian internal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penggunaan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat (nilai guna) yang sangat besar pengaruhnya baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu tambahan ilmu dan informasi yang berguna bagi pembacanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme pengendalian internal pada prosedur produk pembiayaan, dan sebagai

---

<sup>16</sup> Atriani dan Maryana, “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit” *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* 3(2) (November 2017), hlm.13. ISSN 2345-23



tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, dapat menambah kemampuan, pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir bagi penulis serta dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengambil permasalahan yang sama.
2. Bagi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.
3. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep, dapat digunakan sebagai masukan bagi Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep, khususnya agar pengawasan terhadap sistem pengendalian internal pada proses penyaluran produk pembiayaan agar dapat lebih efektif dan efisien.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan makna dan guna mengetahui perbedaan setiap Istilah. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.<sup>17</sup>
2. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 92.

<sup>18</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Semarang: Sarana Belajar, 2012) hlm. 3

3. Pengendalian Internal adalah metode/sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.<sup>19</sup>
4. Poduk Pembiayaan adalah penyediaan dan ada atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

---

<sup>19</sup>Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan* (Jogjakarta: Mitra Belajar, 2009), hlm.183.